

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di
D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Firdianti Wahyu Ramadhani

Nomor Mahasiswa : 18313333

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

HALAMAN JUDUL

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di
D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
pada fakultas bisnis dan ekonomika
Universitas islam indonesia

Oleh:

Nama : Firdianti Wahyu Ramadhani
Nomor Mahasiswa : 18313333
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam Tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Penulis,



Firdianti W.R

PENGESAHAN

Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023

Nama : Firdianti Wahyu Ramadhani
Nomor Mahasiswa : 18313333
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Juli 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing



Moh. Bakti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI Nomor: 120/Ka.ProdiEp/10/Prodi.Ep/UTA/VII/2024

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2024/2025, hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : FIRDIANTI WAHYU RAMADHANI
NIM : 18313333
Judul Tugas Akhir : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011-2020
Dosen Pembimbing : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.
Anggota Tim : Mustika Noor Mifrahi, S.E.I.,M.E.K.

Yogyakarta, 22 Juli 2025

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun
2011-2020**

Disusun oleh : FIRDIANTI WAHYU RAMADHANI

Nomor Mahasiswa : 18313333

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 22 Juli 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Mustika Noor Mifrahi, S.E.I.,M.E.K.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Motto

Jangan takut melangkah. Apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Nikmati dan Jalani prosesnya. “Karena sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah:6)

Halaman Persembahan

alhamdulillahirabbil'alamin, puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Diri sendiri yang mampu untuk menyelesaikan penelitian ini meskipun jauh dari sempurna dalam penulisannya
2. Kedua orang tua, terutama ibu penulis yaitu Indyah Firmani, adik penulis serta keluarga penulis yang memberikan motivasi dan dukungan. Juga atas doa-doa yang mereka panjatkan
3. Teman-teman terdekat yang juga telah memberikan semangat dan motivasi serta dukungan bagi penulis

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmat- Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kelancaran dalam setiap Langkah
2. Bapak Moh. Bakti Hendrie Anto, SE., M.Sc, selaku dosen pembimbing, atas kesediaan dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan untuk penulisan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D. selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Mustika Noor Mifrahi, S.E.I., M.E.K. selaku dosen penguji atas kesediaannya memberikan kritik dan saran dalam penulisan akhir skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, staff akademik dan karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
6. Teman-teman terdekat penulis yaitu Dhalilla, Aisyah dan Fiza yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis hingga bisa menyelesaikan penelitian ini

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Juli 2025

Firdianti W.R

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN	iv
Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Abstrak	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
Kajian Pustaka	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Teori Gender.....	11
2.2.2 Indeks Pembangunan Gender	12

2.2.3	Pengeluaran Pemerintah	14
2.2.3.1	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	14
2.2.3.2	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	15
2.2.4	Kemiskinan.....	15
2.2.5	Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.3	Kerangka Pemikiran.....	17
2.3.1	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	17
2.3.2	Hubungan pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	18
2.3.3	Hubungan Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	18
2.2.1	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	18
2.4	Hipotesis Penelitian.....	19
BAB III		20
Metode Penelitian		20
3.1	Jenis dan Sumber Data	20
3.2	Definisi Variable Operasional.....	20
3.2.1	Indeks Pembangunan Gender.....	20
3.2.2	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	20
3.2.3	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.....	21
3.2.4	Kemiskinan.....	21
3.2.5	Pertumbuhan Ekonomi.....	21
3.3	Metode Penelitian.....	21

3.4	Uji Pemilihan Model	22
3.4.1	Uji Chow.....	22
3.4.2	Uji Hausman	23
3.5	Pengujian Statistic.....	23
3.5.1	Koefisien determinasi (R^2).....	23
3.5.2	Uji F.....	24
3.5.3	Uji t.....	25
Bab IV		26
Hasil dan Pembahasan		26
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	26
4.2	Estimasi Regresi Data Panel	27
4.3	Pemilihan Model Regresi.....	27
4.3.1	Uji <i>Chow</i>	27
4.3.2	Uji Hausman	27
4.4	Model Terbaik.....	28
4.4.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	29
4.5	Uji F-statistic	29
4.4.3	Uji t statistic.....	30
4.5	Interpretasi Hasil Analisis	31
4.5.1	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	31
4.5.2	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Gender.....	34

4.5.3	Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Gender	36
4.5.4	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Gender	37
BAB V		39
SIMPULAN DAN SARAN		39
5.1	Kesimpulan	39
5.2	Saran.....	39
Daftar Pustaka		41
Lampiran		44
	Lampiran 1 Data Penelitian	44
	Lampiran 2 <i>Common Effect Model</i>	47
	Lampiran 3 <i>Fixed Effect Model</i>	48
	Lampiran 4 <i>Random Effect Model</i>	49
	Lampiran 4 Uji <i>Chow</i>	50
	Lampiran 5 Uji <i>Hausman</i>	50

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Dimensi dan Indikator IPG.....	2
Tabel 1. 2 Tingkat IPG Teratas di Indonesia.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4. 1 Alasan Mengundurkan Diri.....	38

Daftar Gambar

Gambar 4. 1 Angka Partisipasi Murni	32
Gambar 4. 2 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	32
Gambar 4. 3 Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	33
Gambar 4. 4 Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	33
Gambar 4. 5 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	35
Gambar 4. 6 Usia Harapan Hidup	36
Gambar 4. 7 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	38
Gambar 4. 8 Perempuan di Posisi Managerial	38

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam salah satu provinsi dengan nilai indeks Pembangunan gender yang tinggi. Artinya ketimpangan gender yang terjadi cukup kecil jika dibandingkan dengan provinsi yang lain. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi indeks Pembangunan gender di D.I Yogyakarta. Dengan menggunakan variable pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan kesehatan, kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan *time series* 2010-2023 dan *cross section* 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks Pembangunan gender. Untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan gender.

Kata kunci : indeks Pembangunan gender, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya patriarki masih berkembang dalam masyarakat, dimana fisik masih menjadi sebuah dasar dalam pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki berperan sebagai pencari nafkah dan penyedia kebutuhan hidup dalam keluarga. Selain itu juga masih berkembang pemikiran bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Citra, peran serta status sebagai seorang perempuan diciptakan oleh budaya sebagai sosok yang lemah lembut, penurut, dan tidak boleh melebihi seorang laki-laki. Perempuan seringkali tidak begitu dianggap dan diperhitungkan keberadaannya. Di Indonesia, kesempatan untuk perempuan bisa mengakses Pendidikan dan pekerjaan baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta jumlahnya belum sebanding dengan laki-laki. Dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Akibatnya, muncul berbagai polemic mengenai kesetaraan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Karena hingga saat ini kesetaraan gender ini masih menjadi isu global yang terus dibicarakan.

Untuk menanggapi isu tersebut, PBB menjadikan kesetaraan gender dalam salah satu dari tujuh belas tujuan yang akan dicapai pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan yang ingin dicapai tersebut yakni antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan dapat bersama-sama terlibat dalam pembangunan. Dengan adanya kesetaraan gender dalam program SDGs menunjukkan bahwa urgensi kesetaraan gender pada bidang pembangunan semakin kuat. Indonesia urgensi mengenai kesetaraan gender dituangkan dalam Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu “mencapai pembangunan yang merata dan merata berarti meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara umum, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih rentan; mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama kepada

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta fasilitas dan infrastruktur ekonomi; dan penghapusan diskriminasi dalam berbagai hal termasuk gender” (Sekretariat Negara, 2017).

Pencapaian kesetaraan gender dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan capaian ukuran pembangunan manusia dengan menggunakan basis gender yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia dimana dimensi dan indikatornya tersebut sama dengan IPM, namun pada IPG mengungkapkan adanya ketidaksetaraan pencapaian antara laki laki dan perempuan. Nilai IPG diperoleh dari rasio antara IPM Laki-laki dengan IPM Perempuan. Rentang nilai dari IPG adalah 0-100, semakin nilai IPG mendekati angka 100 maka ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil atau terjadi kesetaraan gender (Badan Pusat Statistik,).

Tabel 1. 1 Dimensi dan Indikator IPG

Dimensi	Indikator
Umur panjang dan sehat (<i>a long and healthy life</i>)	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kehidupan yang layak (<i>decent standard of living</i>)	Perkiraan pendapatan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indikator angka harapan hidup, dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan juga ketimpangan wilayah. Oleh karena itu pemerintah melakukan pemerataan pada bidang kesehatan di seluruh daerah di Indonesia serta mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan seperti GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat) agar masyarakat dapat meningkatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan yang kurang sehat. Indikator harapan lama sekolah bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran kondisi dari dunia Pendidikan. Salah satu kebijakan yang mendukung indikator ini adalah adanya wajib belajar 12 tahun. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan bisa meningkatkan capaian indikator lama sekolah. Sedangkan untuk indikator rata-rata

lama sekolah menggambarkan mengenai bagaimana kualitas Pendidikan di masyarakat. Perkiraan pendapatan ini tercermin dalam pengeluaran perkapita baik laki-laki maupun perempuan.

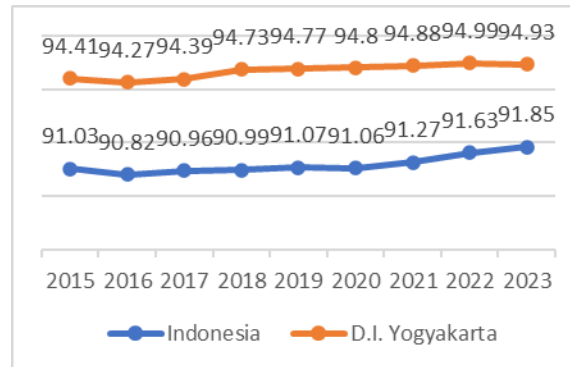
Tabel 1. 2 Tingkat IPG Teratas di Indonesia

Provinsi	IPG						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bali	93,70	93,71	93,72	93,79	94.01	94.36	94.59
D.I. Yogyakarta	94,39	94,73	94,77	94,80	94.88	94.99	94.93
DKI Jakarta	94,70	94,70	94,71	94,73	94.84	94.93	95.24
Sulawesi Utara	94,78	94,79	94,53	94,42	94.61	94.89	95.06
Sumatera Barat	94,16	94,17	94,09	94,17	94.34	94.72	94.93
Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06	91.27	91.63	91.85

Sumber: BPS

Di Indonesia, capaian IPG cenderung mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut tidak lepas dari indikator-indikator IPG yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara keseluruhan provinsi di Indonesia memiliki rata-rata tingkat pencapaian IPG di angka 90. Adapun beberapa provinsi yang secara konsisten menempati posisi teratas dengan nilai IPG cukup tinggi dan melebihi nilai IPG nasional yaitu Provinsi Sumatera Barat, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Bali.

Gambar 1. 1 Perbandingan IPG D.I. Yogyakarta dan Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dengan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun menjadikan Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu provinsi dengan skor IPG tinggi diantara provinsi lainnya, bahkan lebih tinggi dari skor IPG nasional. Menurut Arfiani & Lisyaningsih (2013), tingginya pencapaian angka IPG D.I. Yogyakarta tidak lepas dari adanya implikasi kebijakan oleh Pemerintah D.I. Yogyakarta yang berlandaskan dari Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutaman Gender dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Daerah di D.I. Yogyakarta ingin mewujudkan kesetaraan gender. Provinsi D.I. Yogyakarta sendiri mengawali perwujudan mengenai kesetaraan gender sejak tahun 2002 yang mungkin di tahun tersebut provinsi-provinsi lain belum menyadari tentang kesetaraan gender, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Gubernur No. 411.4/0195 Tahun 2002 tentang Pengarasutamaan Gender (DP3AP2 DIY, 2021).

Di tahun 2020, Provinsi D.I. Yogyakarta Kembali menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Anugerah Parahita Ekapraya merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kementerian, Lembaga serta Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3AP2 DIY, 2021). Adanya penghargaan tersebut membuktikan bahwa Pemerintah D.I. Yogyakarta masih terus berupaya untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Bentuk komitmen dari Pemerintah

D.I. Yogyakarta dalam mewujudkan kesetaraan gender seperti memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan melalui dana APBD dimana kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penyusun IPG.

Menurut teori human capital yang dikemukakan oleh Todaro, investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangat berguna dan berpengaruh bagi modal manusia karena nantinya akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Dasar dari teori ini adalah melihat pentingnya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, inovasi dan pelatihan sebagai penunjang modal fisik. Begitupun menurut Becker yang berpendapat bahwa dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan maka produktivitas dan kualitas akan meningkat karena keinginan mereka untuk terus belajar (Becker, 1993).

Dilihat dari sudut pandang teori *human capital*, kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat pembangunan gender. Ketika kemiskinan mengalami penurunan maka indeks pembangunan gender akan mengalami peningkatan, hal tersebut didasari pemikiran bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik memiliki keinginan untuk terus berkembang. Mereka juga akan lebih saling mengerti dan menghargai mengenai perbedaan gender karena gender bukan hal yang menjadi penghalang apabila dikaitkan dengan pola berpikir. Oleh karena itu, setiap penurunan angka kemiskinan maka pembangunan gender akan meningkat (Setiani *et al.* 2024).

Dalam teori *human capital*, manusia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya dengan terus belajar dengan mengasah pengetahuan dan keterampilan serta berinovasi. Dengan meningkatnya kualitas modal manusia maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu diharapkan perempuan dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat menurunkan kesenjangan gender. Oleh karena itu, dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan mendorong peningkatan pembangunan gender.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di D.I. Yogyakarta Tahun 2010-

2023". Penulis memilih variable Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai variabel dependen karena variable tersebut jarang digunakan dan biasanya dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen indeks pembangunan manusia. Dan untuk variabel independen penulis memilih menggunakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi karena dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel kesehatan dan umur panjang, pendidikan serta standar hidup layak.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki tiga dimensi capaian dasar yang sama dengan IPM yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Berdasarkan tiga dimensi tersebut dapat diartikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi IPG adalah pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan terhadap IPG D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan terhadap IPG D.I. Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap IPG D.I. Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPG D.I Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi D.I. Yogyakarta.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait dengan indeks pembangunan gender dan factor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi institusi/pemerintah.

Dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan terkait indeks pembangunan gender.

3. Bagi pembaca

Sebagai penambah wawasan, referensi serta informasi mengenai indeks pembangunan manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bab yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan teori yang menjadi landasan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai jenis dan metode penelitian, definisi variabel penelitian, metode analisis yang digunakan dalam penelitian

BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul *Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* oleh (Arifin, 2018) membahas mengenai bagaimana pengaruh angka harapan hidup, Tingkat partisipasi Angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan Perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan regresi data panel. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa rasio antara angka harapan hidup Perempuan terhadap laki laki, rasio Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan terhadap laki-laki serta rasio rata-rata lama sekolah Perempuan terhadap laki-laki berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

(Mongan, 2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pusat bidang Pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia. Dan pengeluaran pemerintah daerah bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia. Penelitian tersebut menggunakan metode random effect.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, Sarfiah, & Jalunggono, 2019) mengenai pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Penduduk Yang Memiliki Keluhan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sedangkan penduduk yang memiliki keluhan Kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis fixed effect.

(Firmansyah, Ilman, & Cita, 2020) dalam penelitiannya untuk menguji mengenai Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks Pembangunan manusia di kabupaten Sumbawa tahun 2004-2017. Pada penelitian tersebut menggunakan data sekunder time series dengan metode penelitian OLS. Diperoleh hasil bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan Pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan manusia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan (Aini, 2021) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang Pendidikan dan Kesehatan, pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel. Dari penelitiannya tersebut didapatkan hasil bahwa Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Gender, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender. Sedangkan Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender.

Penelitian dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara oleh (Syukri, Sari, & Nurhuda, 2023) memperoleh hasil bahwa Indeks Pembangunan Gender tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode analisis linier sederhana.

(Setiani, Saleh, & Payu, 2024) dalam penelitiannya yang bertajuk Analisis Indeks Pembangunan Gender di Kawasan Teluk Tomini dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, diperoleh hasil bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Perkapita Perempuan Yang Disesuaikan sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender. Sedangkan kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Gender. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tujuan	Hasil
1	(Arifin, 2018)	Menguji bagaimana pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Rasio AHH, rasio TPAK serta rasio RLS berpengaruh positif dan signifikan
2	(Mongan, 2019)	Menguji bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap ipm	APBN Pendidikan dan kesehatan tidak memiliki pengaruh. APBD kesehatan berpengaruh negatif. APBD Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan.
3	Lestari <i>et al</i> (2021)	Meneliti bagaimana pengaruh AHH, RLS, TPAK dan penduduk yang memiliki keluhan kesehatan.	AHH, RLS dan TPAK memiliki pengaruh positif. Sedangkan penduduk yang memiliki keluhan kesehatan berpengaruh negatif.
4	Aini (2021)	mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan Kesehatan serta pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh. Sedangkan kemiskinan berpengaruh positif.
5	Ira <i>et al</i> (2022)	mengetahui bagaimana pengaruh HLS, RLS, keluhan kesehatan, TPAK.	HLS, RLS dan TPAK memiliki pengaruh positif. Sedangkan penduduk yang memiliki keluhan kesehatan memiliki pengaruh negatif.
6	Setiani <i>et al</i> (2024)	mengetahui bagaimana pengaruh TPAK, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran perkapita Perempuan dan kemiskinan.	TPAK, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Perempuan memiliki pengaruh positif. Sedangkan kemiskinan memiliki pengaruh negatif.
7	Firmansyah <i>et al</i>	mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, bidang kesehatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM	Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan kesehatan tidak memiliki pengaruh. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu tersebut, masih belum banyak yang melakukan penelitian mengenai Indeks Pembangunan Gender. Selain itu, variabel independen yang digunakan pada penelitian di atas adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup dimana variabel tersebut adalah komponen penyusun dari Indeks Pembangunan Gender. Disini penulis mencoba untuk menggunakan variabel pengeluaran pemerintah sektor public dan variabel makroekonomi sebagai variabel independen. Cakupan wilayah yang digunakan pada penelitian ini adalah D.I. Yogyakarta. Hal tersebut didasari oleh nilai dari Indeks Pembangunan Gender di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan bahkan menjadikan provinsi D.I. Yogyakarta sebagai daerah dengan nilai Indeks Pembangunan Gender tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Gender Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan untuk variabel independen yang digunakan pada penelitian ini antara lain variabel pengeluaran pemerintah sektor public yakni pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan, serta untuk variabel makro ekonomi yaitu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Keempat variabel tersebut dipilih karena dirasa memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender karena komponen penyusunnya memiliki kesamaan dengan Indeks Pembangunan Manusia yaitu dimensi Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Gender

Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai gender yaitu Teori Nurture, Teori Nature dan Teori Equilibrium (Sasongko, 2009)

1. Teori Nurture

Menurut teori ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan perbedaan peran dan tugas antara keduanya. Perbedaan ini membuat perempuan mengalami ketertinggalan dan terabaikan dalam peran dan kontribusinya dalam kehidupan seperti berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Teori Nature

Menurut teori ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat sehingga tidak bisa diubah. Perbedaan jenis kelamin tersebut berimplikasi bahwa keduanya memiliki perbedaan peran dan tugas, namun terdapat peran dan tugas yang dapat ditukar dan ada juga yang tidak dapat ditukar karena secara kodrat memang berbeda.

3. Teori Equilibrium

Teori ini menekankan konsep hubungan antara laki-laki dan perempuan yang harmonis. Teori ini tidak menentang mengenai adanya perbedaan gender karena laki-laki dan perempuan seharusnya bekerja sama secara harmonis dan bermitra dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.2.2 Teori *Human Capital*

Teori *human capital* ini pertama kali diperkenalkan oleh Becker yang berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia merupakan hal yang penting. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui Pendidikan dan atau pelatihan. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan maka akan terjadi peningkatan pada produktivitas dan kualitas karena kemampuan mereka mau untuk belajar.

Menurut Todaro, Teori *Human Capital* ini dapat terlihat dari perilaku seseorang yang melakukan investasi dengan maksud untuk memperoleh Tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa depan. Investasi yang dimaksud disini adalah dalam hal Pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan produktivitas dan keterampilan seseorang. Korelasinya dengan kesehatan adalah, dengan kondisi tubuh yang sehat seseorang dapat dengan maksimal menggunakan kemampuannya untuk melakukan produktivitas.

2.2.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau dalam bahasa Inggris disebut *Gender-Related Development Index* (GDI) adalah indikator yang menggambarkan rasio capaian antara laki-laki dan perempuan. IPG kali pertama diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1995 dalam *Human Development Report* atau Laporan Pembangunan Manusia

sebagai indikator yang digunakan dalam pencapaian pembangunan berbasis gender. Dalam *Human Development Report* (HDR) dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian pembangunan yang sama dengan IPM, namun dengan mengungkapkan rasio pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator pencapaian IPG pada dasarnya sama dengan IPM, namun pada IPG mengungkap adanya perbedaan atau ketidaksetaraan dalam pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. (UNDP, 1995). Penghitungan IPG saat ini dihitung berdasarkan

rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki $(IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}})$

$(IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}})$. Metode ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM sehingga dapat terlihat pencapaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki dan angka 100 digunakan sebagai patokan nilai IPG karena angka 100 dianggap sebagai rasio yang sempurna (Badan Pusat Statistik, 2014). Apabila hasil perhitungan mendekati angka 100, maka ketimpangan antara laki-laki dan Perempuan semakin kecil (setara). Namun apabila hasil perhitungan melampaui angka 100, maka terjadi ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan.

Terdapat tiga dimensi dasar yang digunakan untuk mengukur pencapaian IPG yaitu :

1. Umur panjang dan sehat (*Long and Healthy Life*)

indikator yang digunakan pada dimensi umur Panjang dan sehat ini adalah Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan tahun yang dapat dijalani oleh seseorang semenjak lahir dimana hal tersebut juga mencerminkan bagaimana kualitas Kesehatan penduduknya. Salah satu cara untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam Pembangunan kesehatan yang tercermin dari indikator angka harapan hidup adalah sebagaimana tertuang pada UU No 23 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang kesehatan, yang berbunyi bahwa kesehatan adalah keadaan Sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pendidikan merupakan sebuah investasi yang hasil dan dampaknya tidak bisa dirasakan secara instan dalam jangka yang pendek. Hasil dari Pendidikan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat dirasakan dalam waktu yang akan datang. Peningkatan kualitas Pendidikan tercermin pada Harapan Lama Sekolah (HLS) pada penduduk usia 7 tahun keatas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada usia 25 tahun keatas. Semakin tinggi Tingkat Pendidikan, maka semakin tinggi kualitas Pembangunan dan sumber daya manusia yang diperoleh.

3. Standar Hidup Layak (*Decent Standard Of Living*)

Standar hidup layak merupakan patokan kebutuhan dari seorang pekerja atau buruh untuk bisa hidup secara layak dalam satu bulan. Standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pengeluaran perkapita perbulan ini disesuaikan dengan daya beli. Faktor yang mendorong peningkatan pengeluaran perkapita adalah tingkat harga relatif dari barang dan jasa terutama pada makanan.

2.2.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu Tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya suatu perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dan hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara umum, pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan baik negara ataupun daerah dalam menjalankan fungsinya. Pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi:

- a. Pengeluaran langsung, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.
- b. Pengeluaran investasi, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi di masa depan.
- c. Pengeluaran untuk peningkatan lapangan pekerjaan dan daya beli.

2.2.3.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2014 pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan (anggaran Pendidikan) adalah alokasi dari anggaran Pendidikan yang

digunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan dan menjadi tanggungjawab pemerintah. Besaran anggaran Pendidikan tersebut sekurang-kurangnya adalah 20% dari APBN dan atau APBD yang mengacu pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan ini dapat direalisasikan melalui belanja daerah yang memang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat seperti yang tertuang pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa bentuk peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.2.3.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan merupakan pengeluaran yang dialokasikan khusus untuk Kesehatan. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemerintah tanggung jawab pemerintah dalam bidang Kesehatan meliputi penyediaan layanan Kesehatan public yang adil bagi seluruh masyarakat guna mencapai kesejahteraan yang merata. Besaran anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya adalah 5% dari APBN dan 10% dari APBD provinsi dan kota/kabupaten. Adapun upaya pemerintah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan disertai dengan tenaga kesehatan yang mumpuni baik dari segi kualitas juga kuantitas. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar Masyarakat dapat dengan mudah mengunjungi pelayanan kesehatan sehingga terciptalah peningkatan kualitas hidup sehat dan juga kesejahteraan Masyarakat.

2.2.4 Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan adalah suatu keadaan Dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok baik kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Mereka yang pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan nasional (Rp 472.525) per bulan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat menggunakan rumus perhitungannya seperti:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM= Garis Kemiskinan Non Makanan

Untuk garis kemiskinan makanan (GKM) dilihat dari nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum pangan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan diukur dari kebutuhan minimum sandang, tempat tinggal, Pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya selain makanan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan kemiskinan majemuk. Kemiskinan majemuk adalah kemiskinan yang tidak hanya kekurangan dalam hal makanan maupun non makanan, namun juga kemiskinan identitas, informasi, akses, partisipasi dan control. Di negara berkembang, Sebagian besar jumlah penduduk miskinnya adalah Perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa feminisasi kemiskinan memang benar terjadi dan dialami oleh perempuan. Feminisasi kemiskinan menggambarkan bagaimana Perempuan lebih rentan dalam kemiskinan dibandingkan laki-laki. Bentuk kemiskinan yang dialami Perempuan seperti Pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, upah dan juga politik (Kemenpppa, 2016). Selain itu, perspektif bahwa laki-laki dianggap memiliki derajat lebih tinggi dan lebih dihargai daripada Perempuan hingga terdapat pemikiran untuk memberikan Pendidikan lebih tinggi kepada laki-laki sedangkan Perempuan tidak membutuhkan Pendidikan tinggi karena nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga (Sumar, 2015). Hal tersebut turut menyebabkan terjadinya ketimpangan gender.

2.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita suatu daerah karena produksi barang dan jasa dalam lingkup perekonomian. Factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Mankiw adalah modal, modal manusia, sumber daya alam dan teknologi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui besaran nilai produk domestik bruto (PDB) karena produk domestik bruto (PDB) merupakan tolok ukur kesejahteraan dan kemajuan ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) juga menunjukkan bagaimana perbedaan kualitas dan standar hidup suatu daerah yang

tercermin dari tingkat produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Adapun cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

$$\frac{\Delta PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDB_t = nilai PDB tahun terjadi

PDB_{t-1} = nilai PDB tahun sebelum

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Todaro, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh Tingkat produktivitas yang dihasilkan dari investasi Pendidikan, pelatihan, pengembangan dan inovasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa produktivitas dalam kegiatan ekonomi juga mengalami peningkatan. Apabila produktivitas mengalami peningkatan maka kesejahteraan dan standar hidup juga akan meningkat. Dengan begitu maka akan tercipta peluang kesempatan kerja yang diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga akan terjadi peningkatan pendapatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pendidikan adalah sebuah investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan. Output dari Pendidikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan dirasakan di masa mendatang. Dengan adanya pengeluaran pemerintah diharapkan mampu menaikkan kualitas Pendidikan dan juga menambah motivasi mengenyam Pendidikan hingga tingkat tinggi. Terutama bagi perempuan, mayoritas masyarakat masih menganggap bahwa perempuan tidak perlu memiliki Pendidikan tinggi. Hal tersebut tercermin pada indikator rata-rata lama sekolah perempuan yang masih di bawah laki-laki. Diharapkan dengan adanya pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan ini secara tidak langsung akan menambah motivasi masyarakat terutama perempuan untuk menempuh

Pendidikan karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan gender.

2.3.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan tercermin pada peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan infrastruktur guna menunjang peningkatan Kesehatan masyarakat. peningkatan kualitas Kesehatan ini tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi, dan lain sebagainya. Selain itu, secara gaya hidup, laki-laki memiliki resiko kematian yang tinggi akibat kebiasaan merokok, stress dan juga pekerjaan berat. Secara tidak langsung indikator-indikator tersebut berpengaruh pada peningkatan indeks pembangunan gender.

2.3.3 Hubungan Kemiskinan Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

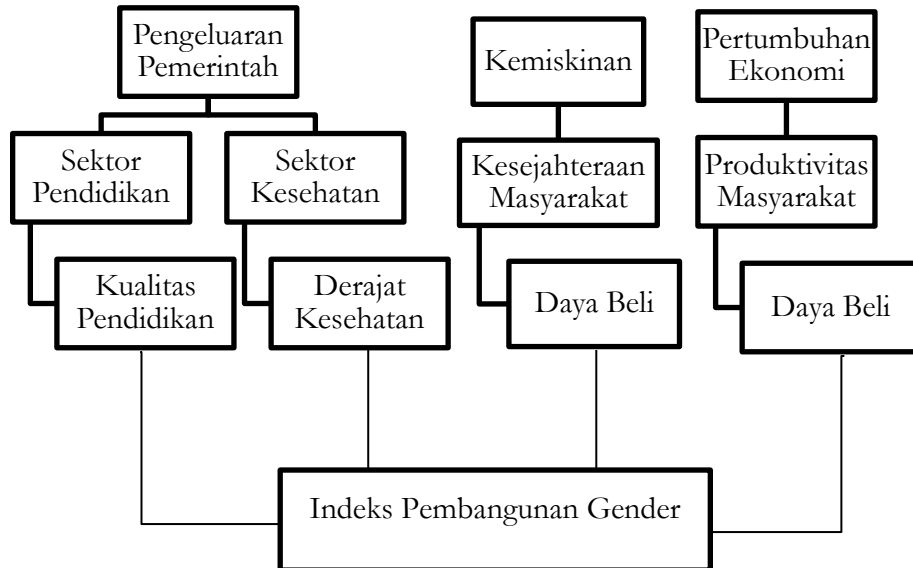
Feminisasi kemiskinan menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan dalam kemiskinan dibandingkan laki-laki. Bentuk kemiskinan yang dialami Perempuan seperti Pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, upah dan juga politik. Selain itu, pandangan mengenai Perempuan yang tidak memerlukan Pendidikan karena nantinya hanya akan mengurus rumah tangga juga turut menyumbang jumlah kemiskinan. Angka kemiskinan yang semakin tinggi akan menurunkan angka partisipasi Pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, Perempuan tidak bisa memiliki kontribusi dalam perekonomian sehingga produktivitas juga rendah. Sehingga, ketimpangan antara Perempuan dan laki-laki akan terus terjadi dan akan semakin tinggi dan indeks Pembangunan gender akan semakin rendah.

2.3.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tren positif pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kualitas Pendidikan, kesehatan serta keterampilan Masyarakat mengalami perbaikan dan peningkatan. Sehingga, kualitas dari sumber daya manusia juga semakin

berkualitas. Kesempatan untuk bekerja antara laki-laki dengan Perempuan juga meningkat sehingga ketimpangan gender yang terjadi akan semakin kecil.

Grafik 1. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori di atas dapat dirumuskan hipotesis seperti :

1. Diduga pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan gender di daerah D.I. Yogyakarta
2. Diduga pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan gender di daerah D.I. Yogyakarta
3. Diduga kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan gender di daerah D.I. Yogyakarta
4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan gender di daerah D.I. Yogyakarta

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dari website Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat Statistik (BPS) D.I. Yogyakarta dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini juga menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara *cross section* dan *time series*. Data *cross section* pada penelitian ini adalah sebanyak 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan data *time series* sejumlah 13 tahun dari tahun 2010-2023. Data yang diteliti meliputi, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

3.2 Definisi Variable Operasional

Dalam penelitian ini menjabarkan apa saja variabel yang digunakan. Variable-variabel tersebut adalah indeks pembangunan gender sebagai variabel dependen dan pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, Kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel.

3.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Dalam penelitian ini indeks pembangunan gender sebagai variabel dependen (Y). IPG digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan namun menggunakan perspektif gender. IPG menjelaskan bagaimana masyarakat baik laki-laki dan perempuan dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh kesempatan serta akses yang sama dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya. Data IPG yang digunakan dinyatakan dalam satuan.

3.2.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan sebagai variabel independen (X1). Pada penelitian ini pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berasal dari APBD dari tahun 2010-2023 dan dinyatakan dengan satuan rupiah.

3.2.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah dalam bidang Kesehatan sebagai variabel independen (X2). Pada penelitian ini pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan berasal dari APBD dari tahun 2010-2023 dan dinyatakan dengan satuan rupiah.

3.2.4 Kemiskinan

Kemiskinan sebagai variable independent (X3). Pada penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2023 yang dinyatakan dengan satuan persen. Persentase data kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY.

3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen (X4). Pada penelitian ini data pertumbuhan ekonomi bersumber dari BPS DIY dari tahun 2010 hingga 2023 dan dinyatakan dalam satuan persen.

3.3 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* (objek tertentu) dengan *time series* (rentang waktu) (Widarjono, 2018). Data *cross section* pada penelitian ini adalah 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan data *time series* adalah tahun 2010-2023. Berikut persamaan regresi data panel :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Y_{it} = Indeks Pembangunan Gender di Kota/Kabupaten di D.I. Yogyakarta

β_0 = Konstanta

X1 = Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan (juta rupiah)

X2 = Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan (juta rupiah)

X3 = Kemiskinan (persen)

X4 = Perumbuhan Ekonomi (persen)

Berdasarkan (Widarjono, 2018) terdapat beberapa model regresi yang dapat digunakan dalam regresi data panel yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Ketiga

model tersebut nantinya akan diuji untuk mendapatkan model yang terbaik untuk digunakan.

3.4 Uji Pemilihan Model

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yakni *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* yang nantinya akan dilakukan pengujian untuk menentukan model mana yang paling baik dan dapat menjelaskan hubungan antara variabel x dengan variabel y. Terdapat dua Langkah dalam melakukan uji pemilihan model. Pengujian pemilihan model yang pertama yaitu dilakukan dengan Uji *Chow* yakni membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect*. Pengujian selanjutnya yaitu Uji Hausman yakni dengan membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect*. Pengujian tersebut nantinya akan dilakukan dengan menggunakan Eviews.

3.4.1 Uji *Chow*

Uji *Chow* adalah uji yang dilakukan dengan membandingkan *common effect* dengan *fixed effect*. Apabila dari hasil pengujian menunjukkan bahwa *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan *common effect* maka selanjutnya akan dilakukan uji hausman. Namun sebaliknya, apabila dari hasil pengujian menunjukkan bahwa *common effect* lebih baik daripada *fixed effect* maka tidak perlu melakukan uji hausman, sehingga didapatkan model yang terbaik untuk dipilih adalah *common effect*.

Adapun hipotesis dalam Uji *Chow* ini yaitu :

H_0 : *common effect* lebih lebih baik daripada *fixed effect*

H_a : *fixed effect* lebih baik daripada *common effect*

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai dari F statistic dibandingkan dengan nilai F kritis. Apabila nilai F statistic lebih besar daripada nilai F kritis maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H_0) atau menerima hipotesis alternatif (H_a) yang berarti *fixed effect* lebih baik daripada *common effect*. Sebaliknya, apabila nilai F kritis lebih besar daripada nilai F statistic maka keputusannya adalah gagal menolak hipotesis nol (H_0) atau menerima hipotesis nol tersebut, sehingga keputusannya adalah *common effect* lebih baik daripada *fixed effect*.

3.4.2 Uji *Hausman*

Uji *Hausman* merupakan yang dilakukan dengan membandingkan antara *fixed effect* dengan *random effect*. Pengujian *Hausman* ini dilakukan apabila pada hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih baik sehingga dilanjutkan dengan Uji *Hausman* ini.

Adapun hipotesis dalam Uji *Hausman* ini yaitu :

H_0 : *random effect* lebih lebih baik daripada *fixed effect*

H_a : *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai dari nilai *chi-square* statistic dengan nilai *chi-squares* kritis. Nilai *chi-squares* kritis dapat dilihat pada tabel distribusi *chi-squares* dengan melihat nilai *degree of freedom* (k). apabila nilai *chi-squares* kritis lebih kecil daripada nilai *chi-square* statistic maka keputusannya adalah gagal menolak hipotesis nol (H_0) ata menerima H_0 yang berarti *random effect* lebih baik daripada *fixed effect*. Sebaliknya, apabila nilai *chi-squares* kritis lebih besar daripada nilai *chi-square* statistic maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H_0) atau menerima hipotesis alternatif (H_a) yang berarti *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*.

3.5 Pengujian Statistic

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2), Uji F-statistic dan Uji t statistic.

3.5.1 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Maksudnya adalah koefisien determinasi ini melihat seberapa besar pengaruh yang dapat dijelaskan dari, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berikut adalah cara untuk mengetahui koefisien determinasi (R^2) :

$$R^2 = \frac{ESS}{ESS + RSS}$$

Keterangan :

R² : Koefisien Determinasi

ESS : *Explained Sum of Squares*

RSS : *Residual Sum of Squares*

Koefisien determinasi memiliki kisaran nilai antara 0 sampai 1. Apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka 1 maka variasi dari variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model. Namun sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka 0 maka variabel independen tidak dapat menjelaskan atau memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.2 Uji F

Uji F merupakan uji statistic yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen (X) secara simultan (Bersama-sama) terhadap variabel dependen (Y). nilai F-statistik dapat diperoleh melalui :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan :

F : nilai F-statistik

R² : koefisien determinasi

n : jumlah observasi

k : jumlah parameter estimasi termasuk intersep

Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji F ini yaitu :

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, secara simultan terdapat pengaruh variable independent (X) terhadap variable dependent (Y).

Hasil dari uji F dapat dilihat melalui nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 (5%) maka keputusannya adalah menolak H₀ yang berarti ada

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 (5%) maka keputusannya adalah gagal menolak H_0 atau menerima H_0 yang berarti bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3 Uji t

Uji t ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). uji t ini dilakukan dengan Berdasarkan nilai signifikansi (Sig).

1. Apabila nilai probabilitas $> 5\%$ artinya variable independent (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai probabilitas $< 5\%$ artinya variable independent (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode data panel yang merupakan gabungan antara data cross section yaitu 5 kabupaten/kota provinsi D.I. Yogyakarta dengan data time series yaitu dari tahun 2010-2023. Total data yang digunakan adalah sebanyak 70 data. Data-data tersebut didapatkan dari berbagai sumber yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK). Data yang digunakan sebagai variabel penelitian dalam penelitian ini antara lain Indeks Independent Gender (IPG) sebagai variabel dependen, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

	IPG	Pendidikan	Kesehatan	Kemiskinan	PE
Mean	93.31429	578747.5	283921.5	12.31171	5.195429
Median	95.06000	571592.0	277660.5	13.73000	5.135000
Maximum	99.27000	932411.0	526348.0	23.62000	13.49000
Minimum	81.29000	235123.0	76044.00	6.490000	0.680000
Std. Dev.	5.195273	179913.8	123384.0	5.391808	1.535916
Observations	70	70	70	70	70

Sumber : olah data Eviews

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Indeks Pembangunan Gender di D.I Yogyakarta adalah 93.31 dengan nilai tertinggi mencapai 99.27 (Kota Yogyakarta) dan nilai terendah sebesar 81,29 (Kab. Gunung Kidul). Nilai rata-rata untuk pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan sebesar 566,508 juta rupiah dengan pengeluaran tertinggi pada daerah Kab. Bantul dengan 932,411 juta rupiah dan Kota Yogyakarta sebesar 235,123 sebagai pengeluaran terendah. Sektor kesehatan memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 283,921 juta rupiah dengan angka tertinggi sebesar 526,348 juta rupiah (Kab. Sleman) dan terendah sebesar 76,044 (Kab. Gunung Kidul). Rata-rata Tingkat kemiskinan yakni 14.13 persen dengan persentase nilai

tertinggi yaitu sebesar 23.62 persen di Kab. Bantul dan nilai terendah sebesar 6.49 persen di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata 5.19 persen dengan nilai tertinggi sebesar 13.49 persen (Kulon Progo) dan terendah sebesar 0.68 persen (Gunung Kidul).

4.2 Estimasi Regresi Data Panel

Pada penelitian ini, proses pengolahan data menggunakan regresi data panel yang nantinya terdapat tiga hasil estimasi, yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dari tiga model estimasi tersebut akan dipilih satu model yang dianggap paling tepat digunakan dalam menganalisis hasil olah data.

4.3 Pemilihan Model Regresi

4.3.1 Uji Chow

Uji *Chow* adalah uji yang dilakukan dengan membandingkan model mana yang lebih baik antara *common effect* dengan *fixed effect*.

Tabel 4. 3 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	700.721949	(4,61)	0.0000
Cross-section Chi-square	269.434304	4	0.0000

Sumber : olah data Eviews

Berdasarkan pengolahan data menggunakan uji *chow* menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari chi square adalah $0,000 < \alpha 5\%$, yang artinya menolak hipotesis nol (H_0). Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa *fixed effect model* lebih baik dari pada *common effect model*.

4.3.2 Uji Hausman

Uji *Hausman* merupakan yang dilakukan dengan membandingkan antara *fixed effect* dengan *random effect*. Pengujian *Hausman* ini dilakukan apabila pada hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dari *common effect model*. Pengambilan keputusan dalam hipotesis dilakukan dengan melihat nilai dari probabilitas. Apabila nilai probabilitas $< \alpha 5\%$ maka *fixed effect model* lebih tepat

digunakan, namun apabila nilai probabilitas $> \alpha 5\%$ maka *random effect model* lebih tepat digunakan.

Tabel 4. 4 Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2802.887687	4	0.0000

Sumber : hasil olah data Eviews

Berdasarkan pengolahan data menggunakan uji *hausman* di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari cross-section random sebesar $0,0000 < \alpha 5\%$, Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa *fixed effect model* lebih baik dari pada *random effect model*.

4.4 Model Terbaik

Pada pengujian menggunakan uji *chow* dan uji *hausman* diperoleh hasil bahwa *fixed effect model* adalah model yang paling tepat digunakan untuk analisis regresi data panel pada penelitian ini.

Tabel 4. 5 *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	84.20654	4.632484	18.17741	0.0000
LOG(PENDIDIKAN)	0.024435	0.192057	0.127230	0.8992
LOG(KESEHATAN)	0.978399	0.296184	3.303345	0.0016
KEMISKINAN	-0.234384	0.072261	-3.243558	0.0019
PE	-0.014470	0.045728	-0.316438	0.7528
R-squared	0.990150			
Adjusted R-squared	0.988858			
F-statistic	766.4815			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olah data Eviews

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, *fixed effect model* merupakan model yang tepat untuk digunakan. Selanjutnya akan dilihat bagaimana evaluasi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen yang meliputi kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan serta pertumbuhan ekonomi. Evaluasi hasil regresi meliputi koefisien determinasi (R^2), uji F-statistic dan uji t statistic.

4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan table di atas, nilai dari koefisien determinasi atau *R-squared* (R^2) adalah 0.99015 atau sama dengan 99,01% yang memiliki makna bahwa variabel dependen IPG dapat dijelaskan oleh variabel independennya yakni kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 0,99% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak terdapat di dalam penelitian.

4.4.2 Uji F-statistic

Tabel 4. 6 Uji F

R-squared	0.990150
Adjusted R-squared	0.988858
F-statistic	766.4815
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Olah data Eviews

Berdasarkan table di atas, nilai dari probabilitas F-statistik adalah $0.000000 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$), Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender.

4.4.3 Uji t statistic

Tabel 4. 7 Uji t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	84.20654	18.17741	0.0000	
LOG(PENDIDIKAN)	0.024435	0.127230	0.8992	Tidak Signifikan
LOG(KESEHATAN)	0.978399	3.303345	0.0016	Signifikan
KEMISKINAN	-0.234384	-3.243558	0.0019	Signifikan
PE	-0.014470	-0.316438	0.7528	Tidak Signifikan

Sumber : olah data Eviews

a. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPG

Berdasarkan table di atas, nilai dari probabilitas variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah $0.8992 > 0.05$ ($\alpha = 5\%$), Dapat disimpulkan bahwa variable pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender.

b. Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPG

Berdasarkan table di atas, nilai dari probabilitas variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan adalah $0.0016 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$), Dapat disimpulkan bahwa variable pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender. Dengan nilai koefisien 0.978399 dapat dimaknai bahwa Ketika pengeluaran sektor kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1 persen rupiah maka indeks Pembangunan gender juga akan meningkat sebesar 0.978399 persen.

c. Variabel kemiskinan terhadap IPG

Berdasarkan table di atas, nilai dari probabilitas variabel kemiskinan adalah $0.0019 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$), dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender. Dengan nilai koefisien -0.234384 dapat diketahui bahwa Ketika kemiskinan meningkat sebesar 1% maka indeks Pembangunan gender akan mengalami penurunan sebesar -0.234384%.

d. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan table di atas, nilai dari probabilitas variabel pertumbuhan ekonomi adalah $0.7528 > 0.05$ ($\alpha=5\%$), Dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender

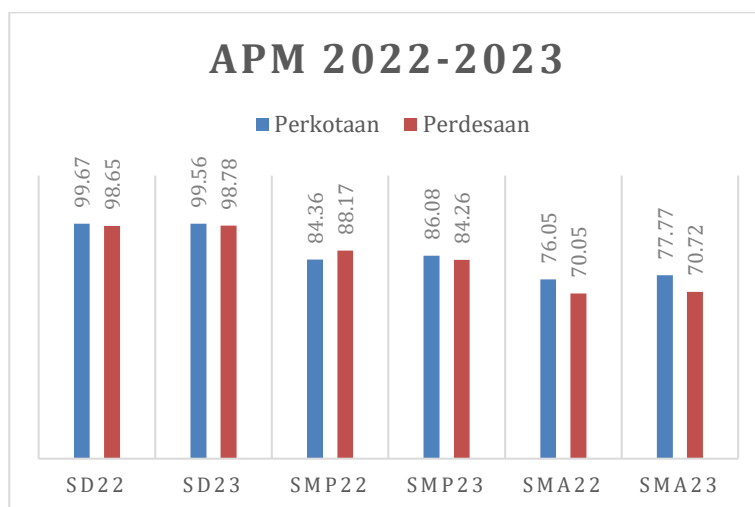
4.5 Interpretasi Hasil Analisis

4.5.1 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan gender di D.I yogyakarta. Nilai probabilitas pada variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan sebesar 0.8992, artinya hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan memiliki pengaruh terhadap IPG.

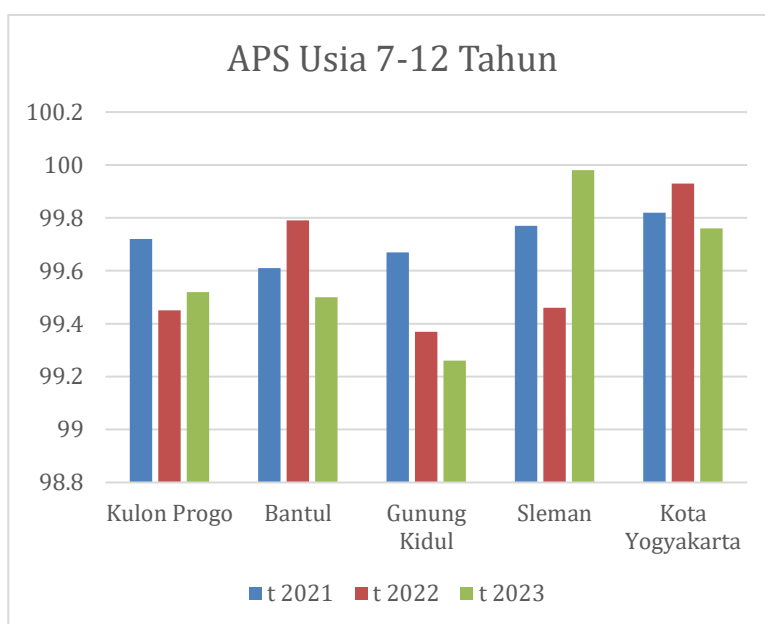
Meskipun pemerintah provinsi DIY memberikan anggaran yang cukup besar untuk bidang Pendidikan, realisasinya hal tersebut belum cukup berpengaruh terhadap Pendidikan di DIY. Hal tersebut tercermin pada tingkat angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM), meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi Tingkat APM dan APS penduduk di pedesaan masih lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Alasannya adalah infrastruktur Pendidikan untuk menengah dan atas masih terpusat di wilayah perkotaan, selain itu alasan ekonomi seperti biaya Pendidikan yang kurang terjangkau, sulitnya akses untuk sekolah, bekerja untuk membantu ekonomi keluarga serta tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar juga turut menjadi hambatan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa besarnya anggaran untuk bidang Pendidikan masih belum tepat sasaran. Rendahnya Tingkat Pendidikan nantinya akan berdampak pada rendahnya produktivitas sehingga kesejahteraan juga akan rendah yang mengakibatkan bertambahnya Tingkat kemiskinan.

Gambar 4. 1 Angka Partisipasi Murni



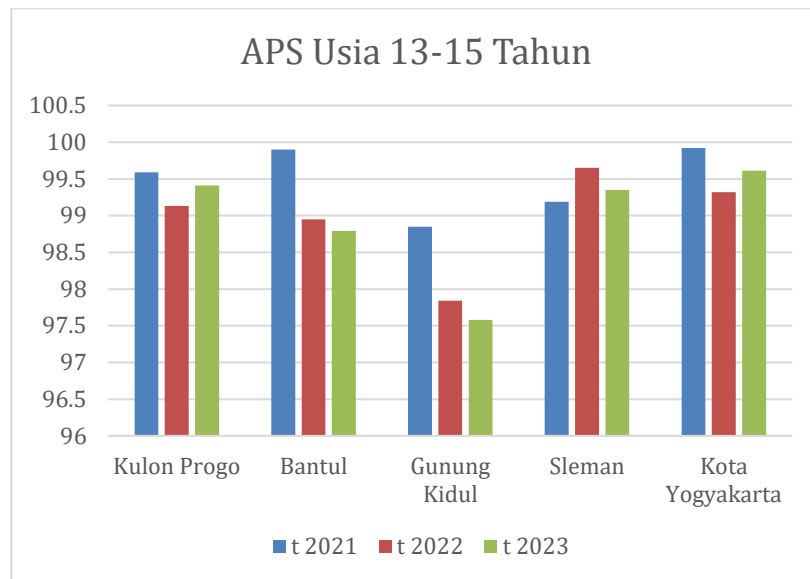
Sumber: BPS Daerah DIY 2023

Gambar 4. 2 Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun



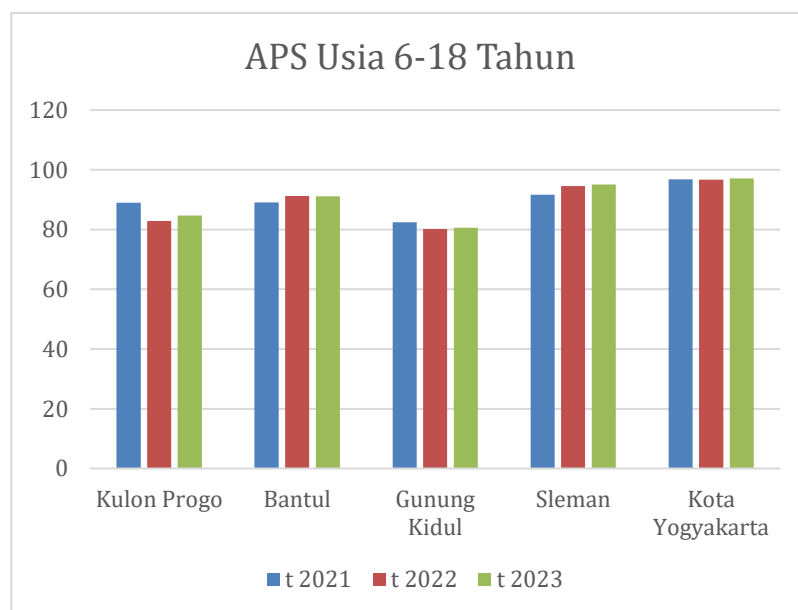
Sumber: BPS Daerah DIY 2023

Gambar 4. 3 Angka Partisipasi Sekolah Usian 13-15 Tahun



Sumber: BPS Daerah DIY 2023

Gambar 4. 4 Angka Partisipasi Sekolah Usia 6-18 Tahun



Sumber: BPS Daerah DIY 2023

Dari grafik di atas, dapat dilihat angka partisipasi di daerah perdesaan seperti Gunung Kidul masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah yang lain terutama dengan Kota Yogyakarta. Jika dilihat secara keseluruhan bahwa semakin lama tingkat partisipasi sekolah daerah gunung kidul semakin rendah. Selain faktor kemiskinan,

faktor lain yang mempengaruhi adalah lingkungan sosial. Rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dan motivasi untuk belajar serta pernikahan dini juga mempengaruhi. Menurut Disdikpora Gunung Kidul, angka putus sekolah masih tinggi yaitu sebanyak 1.710 siswa sekolah dasar, 810 siswa sekolah menengah pertama dan 1.620 siswa sekolah menengah atas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa motivasi dan keinginan untuk mengenyam pendidikan masih rendah (Khazanh, 2023).

Faktor yang lain yaitu pernikahan dini. pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3AKBPM) mencatat bahwa terdapat 150 data pengajuan pernikahan di bawah umur. Hal tersebut di dasari oleh orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah, adanya kehamilan yang tidak diinginkan dan keinginan dari anak tersebut untuk segera menikah daripada harus melanjutkan pendidikan (Khazanh, 2023).

Hasil di atas sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Firmansyah *et al*, 2020) dan (Mongan, 2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan gender.

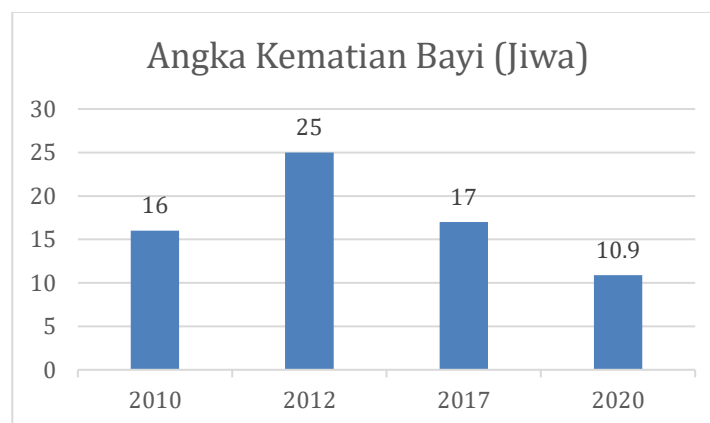
4.5.2 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Gender

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan gender di D.I yogyakarta. Nilai probabilitas pada variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan sebesar 0.0016, artinya hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki pengaruh terhadap IPG. Hasil di atas sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mongan, 2019) dan (Arifin, 2018) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh terhadap IPG.

Pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan memiliki pengaruh terhadap IPG. Hal tersebut tercermin dari fasilitas kesehatan dan distribusi tenaga medis yang mengalami peningkatan. Meskipun fasilitas kesehatan masih cenderung terpusat pada

daerah kota Yogyakarta dan sleman, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan dasar agar bisa membantu peningkatan pelayanan di daerah yang lain. Seperti puskesmas, puskesmas pembantu juga puskesmas keliling. Pihak swasta juga turut menyediakan fasilitas kesehatan melalui adanya klinik pratama. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) juga secara tidak langsung memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat berangsur membaik terutama untuk ibu dan balita. Karena penurunan tersebut berkaitan erat dengan peningkatan pengetahuan Wanita terutama mengenai kesehatan reproduksi, kesuburan, kehamilan, persalinan dan perawatan pasca persalinan. Selain itu, dukungan dari keluarga juga penting terlebih dalam memastikan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat selama kehamilan hingga proses melahirkan serta dalam perawatan dan pengasuhan bayi pasca kelahiran.

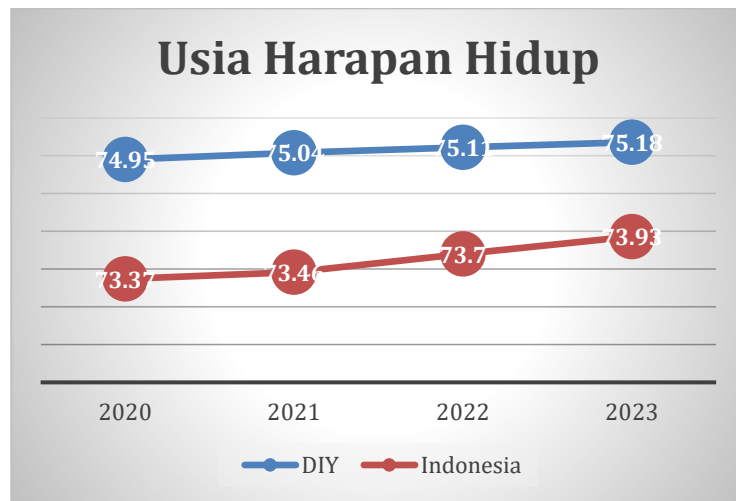
Gambar 4. 5Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran



Sumber: Data Pilah Gender DIY 2022

Selain itu, derajat kesehatan yang meningkat juga ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup. Di D.I Yogyakarta sendiri, rata-rata usia harapan hidupnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka usia harapan hidup nasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbaikan kualitas kesehatan dan gizi serta gaya hidup yang semakin baik. Derajat kesehehatan yang baik dapat tercapai karena mudahnya akses terhadap layanan kesehatan. Karena layanan kesehatan yang baik dan memadai turut memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan bagi lansia.

Gambar 4. 6 Usia Harapan Hidup



Sumber: BPS Daerah DIY 2023

4.5.3 Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Gender

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan negative terhadap indeks Pembangunan gender di D.I Yogyakarta. Nilai probabilitas pada variabel kemiskinan sebesar 0.0019 artinya hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh terhadap IPG.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aini, 2021) dan (Setiani *et al* 2024) yang mengatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negative signifikan terhadap IPG. tingginya angka kemiskinan akan menyebabkan penurunan kemampuan Masyarakat dalam mengakses Pendidikan, kesehatan, serta ekonomi yang membuat kualitas dan kemampuan dalam bekerja menjadi kurang maksimal. Kesenjangan kemampuan antara laki-laki dan Perempuan mengalami peningkatan sehingga peluang kerja untuk Perempuan juga akan semakin menyempit karena laki-laki dianggap memiliki kewajiban untuk mencari nafkah.

Kemiskinan di D.I Yogyakarta memiliki karakteristik yang berbeda, bersifat alami (kewilayahan) dan struktural (Hafidh *et al*, 2016). Kemiskinan di D.I Yogyakarta sendiri sebagian besar terjadi pada daerah perdesaan dengan kondisi geografis yang

cukup menantang seperti Gunung Kidul. Hal tersebut bisa terjadi karena peran urbanisasi yang kurang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Penduduk wilayah tersebut tetap bertahan atau bahkan terjebak pada pekerjaan informal dengan upah rendah, selain itu faktor lainnya adalah mereka tidak memiliki pendidikan dan atau keterampilan yang menunjang dan relevan untuk bekerja di daerah perkotaan.

4.5.4 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Gender

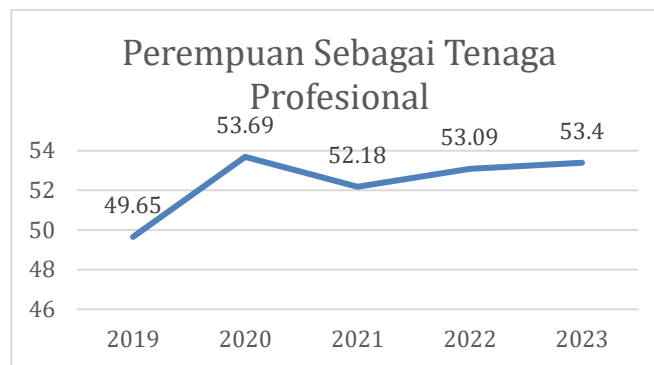
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan gender di D.I yogyakarta . hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan gender. Dari hasil tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi belum tentu memiliki dampak terhadap Pembangunan gender. Masih diperlukan adanya kebijakan yang dapat memberikan pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan angka partisipasi Perempuan terhadap Angkatan kerja sehingga kontribusi Perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan kesetaraan gender juga akan meningkat. Perempuan masih sering dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, bekerja pada usaha yang dikelola keluarga juga dianggap sebagai latiahn untuk bekerja sehingga kontribusinya dalam sektor ekonomi seringkali tidak dianggap. Cara pandang perempuan terhadap bekerja juga menumbuhkan sikap pasrah terhadap upah yang menyebabkan adanya kesenjangan upah antara laki-laki dengan perempuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Aini, 2021), (Syukri *et al*/2023) dan (Setiani *et al*/2024) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan gender.

Di D.I Yogyakarta sendiri, keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi terutama perempuan yang bekerja menjadi tenaga profesional cukup mengalami peningkatan walaupun masih belum setara jika dibandingkan dengan laki-laki. Namun peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan fakta bahwa perempuan yang bekerja di posisi manajerial. Penurunan tersebut disebabkan banyaknya perempuan yang memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dengan alasan fertilitas, hamil

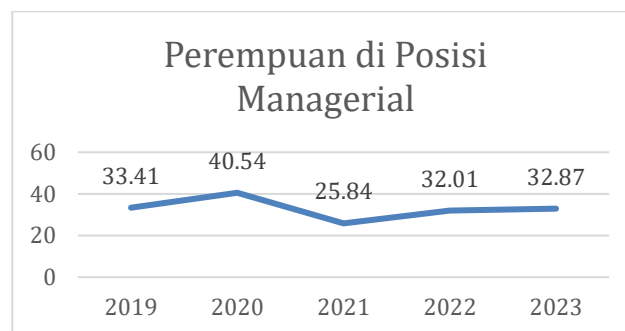
dan atau melahirkan. Sejauh ini kebijakan mengenai cuti bagi perempuan yang hamil dan melahirkan sangat terbatas dan tak jarang ketika cuti mereka juga tidak mendapatkan upah, sehingga tidak ada pilihan yang lain selain mengundurkan diri. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana rendahnya kuasa perempuan saat menjalani peran kodratnya.

Gambar 4. 7 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional



Sumber: Data Pilah Gender DIY 2022 dan BPS DIY 2023

Gambar 4. 8 Perempuan di Posisi Managerial



Sumber: Buku Data Gender dan Anak DIY 2022 dan BPS DIY 2023

Tabel 4. 1 Alasan Mengundurkan Diri

Jenis alasan	2017		2018	
	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	Perempuan
Hamil/melahirkan/nifas	0	7.012	0	7.518
Mengurus rumah tangga	2.049	12.876	797	17.567

Sumber: Data Pilah Gender DIY 2022

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variable pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan gender di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023.
2. Variable pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023.
3. Variabel Kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023.
4. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan gender di D.I Yogyakarta Tahun 2010-2023.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender (IPG). Dapat diambil beberapa langkah efisien guna meningkatkan indeks pembangunan gender (IPG) sebagai berikut.

1. Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan hendaknya lebih diperhatikan kembali. Meskipun memiliki anggaran yang cukup besar tetapi realitanya masih belum cukup berdampak dalam pemerataan Pendidikan. Diperlukan perbaikan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan. Mengingat Pendidikan adalah dasar dari Pembangunan manusia. Dengan meningkatnya Pendidikan maka akan tercipta produktivitas yang semakin baik, kesejahteraan juga akan meningkat.
2. Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan juga terus ditingkatkan agar indeks pembangunan gender juga meningkat. Terutama pemberian bantuan Kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui yang sangat berisiko, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Selain itu juga perbaikan

dan pemerataan fasilitas Kesehatan yang layak juga tenaga medis yang profesional perlu ditingkatkan.

3. Pengentasan kemiskinan juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif terhadap Pembangunan gender. Dimana Ketika angka kemiskinan mengalami peningkatan maka angka IPG akan menurun sehingga akan terjadi kesenjangan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dapat memberikan program seperti pelatihan kerja juga kewirausahaan dan perbaikan akses Pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki pengaruh terhadap Pembangunan gender setidaknya dapat diatasi dengan memberikan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan peluang bagi semua Masyarakat tanpa memandang gender seperti Melibatkan Perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agus Widarjono, P. (2018). *EKONOMETRIKA Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aini, A. N. (2021). ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol. 16 No. 1*, 77-91.
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kajian*, 27-41.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017-2023). *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN. (2020). Retrieved from KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- DP3AP2 DIY. (2021, April 24). *Daerah Istimewa Yogyakarta Salah Satu Nominator APE*.
- Hafidh, A. A., Fikri, M. Si., S., Sholeh, M.Si., M., & Baroroh, M.Pd., K. (2016). FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN (URBAN POVERTY) DI YOGYAKARTA : SUATU KAJIAN STRUKTUR DAN RESPONS KEBIJAKAN. *Jurnal UNY*, 1-15.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Feminisasi Kemiskinan Serta Dampak Kebijakan di Provinsi Bengkulu*. Retrieved from Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTMwMg==#:~:text=Feminisasi%20kemiskinan%20merupakan%20keterwakilan%20perempuan,perempuan%20dalam%20bidang%20ekonomi%2C%20pendidikan%2C>

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Kajian Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Dalam Menggerakkan Industri Rumahan di Provinsi D.I Yogyakarta*. Jakarta: PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Khazanh, M. N. (2023, Januari 11). *Pendidikan di GunungKidul: Sebuah Tantangan, Masalah, dan Kenyataan yang Harus Dihadapi*. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/5200_melanienoorkhazanah6765/63be5a844addee5cc53a4952/pendidikan-di-gunungkidul-sebuah-tantangan-masalah-dan-kenyataan-yang-harus-dihadapi
- Laode, M., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2-15-2018). *Jurnal Berkalah Efisiensi*, 58-67.
- Lestari, I. E., Sarfiah, S. N., & Jalunggono, G. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 323-332.
- Mongan, J. J. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik Volume 4 Nomor 2*, 163-176.
- Sasongko, S. S. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: BKKBN.
- Sekretariat Negara. (2017, August 16). *RPJPN 2005-2025*. Retrieved from Kementrian PPN/Bappenas: <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjp-2005-2025/>
- Setiani, S. A., Saleh, S. E., & Payu, B. R. (2024). ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI KAWASAN TELUK TOMINI DAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA. *JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (JSEP)*, 127-136.

Sumar, W. T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Musawa Vol, 7 No.1*, 158-182.

Syukri, M., Sari, N., & Nurhuda. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Manajemen Ekonomi Terapan*, 128-134.

Todaro, M. P. (1998). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

UNDP. (1995). *Human Development Reports 1995*. New York: Oxford University Press.

Lampiran

Lampiran 1 Data Penelitian

Daerah	tahun	ipg	Kesehatan	Pendidikan	kemiskinan%	pe %
Kab. Bantul	2010	93.37	116,495	932,411	16.09	5.02
Kab. Bantul	2011	93.48	144,805	879,177	17.28	5.07
Kab. Bantul	2012	93.78	179,080	839,954	16.97	5.33
Kab. Bantul	2013	94.33	222,271	826,150	16.48	5.46
Kab. Bantul	2014	94.41	262,385	803,356	15.89	5.04
Kab. Bantul	2015	94.42	311,455	782,585	16.33	4.97
Kab. Bantul	2016	94.28	400,419	762,553	14.55	5.06
Kab. Bantul	2017	94.98	368,899	750,896	14.07	5.1
Kab. Bantul	2018	95.11	418,891	739,578	13.43	5.47
Kab. Bantul	2019	95.18	408,095	739,450	12.92	5.53
Kab. Bantul	2020	95.12	440,012	735,681	-13.50	1.65
Kab. Bantul	2021	95.19	524,569	734,439	14.04	5
Kab. Bantul	2022	95.36	456,440	734,055	12.27	5.19
Kab. Bantul	2023	95.54	483,782	728,042	11.95	5.06
Kab. G. Kidul	2010	81.29	76,044	722,362	22.05	4.5
Kab. G. Kidul	2011	81.33	86,197	721,680	23.03	4.52
Kab. G. Kidul	2012	81.42	105,010	721,529	22.72	4.84
Kab. G. Kidul	2013	81.76	145,629	718,069	21.70	4.97
Kab. G. Kidul	2014	82.27	148,351	698,566	20.83	4.54
Kab. G. Kidul	2015	83.1	197,955	697,493	21.73	4.82
Kab. G. Kidul	2016	84.25	202,884	694,423	19.34	4.89
Kab. G. Kidul	2017	84.03	245,750	691,265	18.65	5.01
Kab. G. Kidul	2018	84.59	232,208	683,881	17.12	5.16
Kab. G. Kidul	2019	84.62	338,409	683,673	16.61	5.34
Kab. G. Kidul	2020	84.73	331,594	677,212	-17.07	0.68
Kab. G. Kidul	2021	85.31	365,291	674,790	17.69	5.31
Kab. G. Kidul	2022	85.82	367,561	671,995	15.86	5.37

Kab. G. Kidul	2023	85.93	341,650	669,823	15.60	5.04
Kab. K. Progo	2010	91.91	79,780	661,687	23.15	3.06
Kab. K. Progo	2011	92.73	90,029	646,094	23.62	4.23
Kab. K. Progo	2012	93.27	109,131	638,212	23.32	4.37
Kab. K. Progo	2013	94.23	164,987	630,758	21.39	4.87
Kab. K. Progo	2014	94.65	176,956	616,622	20.64	4.57
Kab. K. Progo	2015	94.73	216,975	603,757	21.40	4.62
Kab. K. Progo	2016	94.38	248,056	575,881	20.30	4.76
Kab. K. Progo	2017	94.93	254,821	567,303	20.03	5.97
Kab. K. Progo	2018	95.03	371,368	552,630	18.30	10.83
Kab. K. Progo	2019	95.05	392,122	540,484	17.39	13.49
Kab. K. Progo	2020	95.07	396,319	536,431	-18.01	4.06
Kab. K. Progo	2021	95.09	240,171	535,855	18.38	4.37
Kab. K. Progo	2022	95.54	326,336	526,168	16.39	6.58
Kab. K. Progo	2023	95.27	380,268	520,118	15.64	5.65
Kab. Sleman	2010	92.96	111,240	509,654	10.7	5.3
Kab. Sleman	2011	94.22	124,012	495,231	10.61	5.42
Kab. Sleman	2012	94.75	163,867	491,377	10.44	5.79
Kab. Sleman	2013	95.5	181,912	476,881	9.68	5.89
Kab. Sleman	2014	96.09	203,712	474,318	9.50	5.3
Kab. Sleman	2015	96.08	255,873	468,786	9.46	5.18
Kab. Sleman	2016	95.51	348,477	463,616	8.21	5.25
Kab. Sleman	2017	95.62	392,622	460,340	8.13	5.34
Kab. Sleman	2018	96.01	369,324	448,020	7.65	6.42
Kab. Sleman	2019	96.04	392,902	446,571	7.41	6.49
Kab. Sleman	2020	96.2	435,803	438,022	-8.12	3.91
Kab. Sleman	2021	96.25	484,106	432,580	8.64	5.61
Kab. Sleman	2022	96.36	508,589	426,092	7.74	5.15
Kab. Sleman	2023	96.4	526,348	425,848	7.52	5.09
Kota Yk	2010	97.91	157,177	406,123	9.75	5.5

Kota Yk	2011	97.92	174,423	400,833	9.62	5.84
Kota Yk	2012	98.16	191,600	400,438	9.38	5.4
Kota Yk	2013	98.48	200,853	390,351	8.82	5.47
Kota Yk	2014	99.27	217,746	387,811	8.67	5.29
Kota Yk	2015	98.78	250,743	369,371	8.75	5.09
Kota Yk	2016	98.35	292,936	356,364	7.70	5.11
Kota Yk	2017	98.26	294,878	342,101	7.64	5.24
Kota Yk	2018	98.48	318,371	320,934	6.98	5.49
Kota Yk	2019	98.09	331,877	286,617	6.84	5.96
Kota Yk	2020	98.16	329,896	260,921	-7.27	2.42
Kota Yk	2021	98.32	411,005	235,123	7.69	5.16
Kota Yk	2022	98.48	415,181	463,616	6.62	5.12
Kota Yk	2023	98.47	419,583	567,303	6.49	5.08

Lampiran 2 *Common Effect Model*

Dependent Variable: IPG

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/25 Time: 20:51

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	124.0126	16.35627	7.581961	0.0000
LOG(PENDIDIKAN)	-3.029464	1.063551	-2.848442	0.0059
LOG(KESEHATAN)	1.240280	1.079509	1.148930	0.2548
KEMISKINAN	-0.580188	0.097002	-5.981222	0.0000
PE	0.382226	0.289435	1.320594	0.1913
R-squared	0.537549	Mean dependent var	93.31429	
Adjusted R-squared	0.509091	S.D. dependent var	5.195273	
S.E. of regression	3.640063	Akaike info criterion	5.490628	
Sum squared resid	861.2538	Schwarz criterion	5.651235	
Log likelihood	-187.1720	Hannan-Quinn criter.	5.554423	
F-statistic	18.88889	Durbin-Watson stat	0.252118	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3 *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IPG

Method: Panel Least Squares

Date: 07/13/25 Time: 20:00

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	84.20654	4.632484	18.17741	0.0000
LOG(PENDIDIKAN)	0.024435	0.192057	0.127230	0.8992
LOG(KESEHATAN)	0.978399	0.296184	3.303345	0.0016
KEMISKINAN	-0.234384	0.072261	-3.243558	0.0019
PE	-0.014470	0.045728	-0.316438	0.7528

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990150	Mean dependent var	93.31429
Adjusted R-squared	0.988858	S.D. dependent var	5.195273
S.E. of regression	0.548388	Akaike info criterion	1.755852
Sum squared resid	18.34446	Schwarz criterion	2.044945
Log likelihood	-52.45483	Hannan-Quinn criter.	1.870683
F-statistic	766.4815	Durbin-Watson stat	0.660381
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4 *Random Effect Model*

Dependent Variable: IPG

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/13/25 Time: 20:01

Sample: 2010 2023

Periods included: 14

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 70

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	124.0126	2.464126	50.32721	0.0000
LOG(PENDIDIKAN)	-3.029464	0.160228	-18.90726	0.0000
LOG(KESEHATAN)	1.240280	0.162632	7.626315	0.0000
KEMISKINAN	-0.580188	0.014614	-39.70189	0.0000
PE	0.382226	0.043604	8.765784	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.13E-05	0.0000
Idiosyncratic random		0.548388	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.537549	Mean dependent var	93.31428
Adjusted R-squared	0.509091	S.D. dependent var	5.195273
S.E. of regression	3.640063	Sum squared resid	861.2537
F-statistic	18.88889	Durbin-Watson stat	0.252118
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.537549	Mean dependent var	93.31429
Sum squared resid	861.2538	Durbin-Watson stat	0.252118

Lampiran 4 Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	700.721949	(4,61)	0.0000
Cross-section Chi-square	269.434304	4	0.0000

Lampiran 5 Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2802.887687	4	0.0000